

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Araf dkk. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bacharuddin Jussuf Habibie. 2006. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: The Habibie Center Mandiri.
- Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Brian Z. Tamanaha. 2004. *On The Rule of Law: History, Politics, Theory*, New York: Cambridge University Press
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Kerjasama Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2012. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- International Commission of Jurists. 2007. *International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers, and Prosecutors*. Jenewa: International Commission of Jurists
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_ 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

- \_\_\_\_\_ 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Lembaga kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 2002. *“Andai Saya Terpilih...”*: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA. Jakarta:Garis Warna 21
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V. Sinar Bakti
- Muhammad Fajrul Falakh, dkk. 2001. *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Montesquieu. 2014. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung:Nusa Media
- Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Sejarah TNI: Jilid I (1945-1949)*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
- R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta:FH UII Press
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Sebastian Pompe. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta:Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:FH UI Press

Sri Sumantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945)*. Bandung:Alumni,

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses, dan hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: PT Buku Seru

Yoyok Ucok Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen Hukum Internasional, dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR VI/MPR/1999 tentang Pemisahan TNI dan Polri

TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara nasional Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung

Keputusan presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara nasional Indonesia ke Mahkamah Agung

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region

The Bangalore Principle of Judicial Conduct

IBA Minimum Standard of Judicial Independence

The Mount Scopus Standard of Judicial Independence

United Nation Basic Principles on the independence of the Judiciary

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT.III/AD/III/2013

Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 01-K/PMU/BDG/AD/2014

### Internet

KontraS. "Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa, Riwayatmu Kini? Jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah meninggal di mana kuburnya?", diunduh dari <http://kontras.org/index.php?hal=data>, diakses pada tanggal 21 Juni 2015 Pukul 00:26 WIB

Usman Hamid dan Sri Suparyati. "Penghilangan Orang Secara Paksa", dalam <http://kontras.org/index.php?hal=opini&id=27> diakses pada tanggal 21 Juni 2015 Pukul 00.02 WIB

<http://elsam.or.id/2015/08/kekerasan-tni-di-kawasan-urut-sewu-kebumen-bukti-kuat-langgengnya-impunitas-kekerasan/> diakses pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 pukul 21:31 WIB

<http://m.detik.com/news/berita/168621/rebutan-lahan-puluhan-personel-tni-au-rusak-rumah-warga> diakses pada hari Sabtu, 21 November 2015 pukul 16.53 WIB

<http://m.liputan6.com/news/read/2225213/jenderal-moeldokoresmi-restrukturisasi-polisi-militer-tni> diakses pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 13.51 WIB

<http://m.news.viva.co.id/news/read/621448-Polisi-militer-tni-resmi-dibentuk--ini-kewenangannya> diakses pada tanggal 21 November 2015, pukul 20:10 WIB

<http://m.tempo.co/read/news/2013/05/22/063482319/jenderal-djaja-suparman-bantah-korupsi> diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 21.45 WIB

<http://batamtvnews.com/berita/20070/sudah-purna-wirawan-jenderal-bintang-tiga-tetap-berseragam.html> diakses pada tanggal 11 April 2016 21.50 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8a6b1c2d60/ini-daftar-37-ruu-prolegnas-prioritas-2015> diakses pada tanggal 15 Februari 2015 Pukul 12:48

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/10/PEMILU-1977-1977/MzQz> diakses pada tanggal Kamis, 5 November Pukul 22.08 WIB

<http://www.pomdam3siliwangi.com> diakses pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20:48 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/11/mps1e8-komandan-pasukan-kandang-menjangan-bela-terdakwa-kasus-cebongan> diakses pada 2 Februari 2016 Pukul 5:21 WIB

### **Media Cetak, Jurnal, Ringkasan Disertasi, Majalah dan Makalah**

“Mengadili Tindak Pidana Oleh Militer” dalam Majalah Wacana HAM, Edisi II/Tahun XI/2013

“Agar Prajurit Bisa Jujur” dalam koran *Tempo* Selasa, 3 November 2009

Caisa Aamuliadiga, Baruga Ermond, dan Gerry Putra Suwardi. “Upaya Negara Dalam Menciptakan Keamanan Hakim Guna Mencapai Peradilan Umum yang Independen”. Karya Tulis yang diikuti sertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Law Enforcement Fair 2014 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Oce Madril. 2012. “*Judicial Appointment in Indonesia, An Analysis of the Role of Judicial Commission in Preventing the Political Interference to the Judiciary*”. *Jurnal Konstitusi*. Volume I, No. 1.

Saldi Isra. 2014. “Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum”. Penelitian BPHN.

Siti Fatimah. “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”. Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

## **Wawancara**

Wawancara dengan Kol. CHK. Mahmud, Panitera Muda Pidana Militer di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan eks hakim militer, pada tanggal 22 Oktober 2015.

Wawancara dengan Mayor SUS Tri Achmad Bhaykonni, S.H., hakim militer pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pernah menjadi hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta mengadili perkara pidana militer ‘Kasus Cebongan’, pada tanggal 23 Oktober 2015

